

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimasud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta,.....

Penulis,

Pajar Nugraha

Tabel 2.5.
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADH KONSTAN 1993
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2002 – 2004
(%)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PERTANIAN	2.7	4.89	2.28
1.1. Tanaman Bahan Makanan	2.68	5.41	4.72
1.2. Tanaman Perkebunan	0.75	1.35	-28.87
1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2.05	7.41	4.14
1.4. Kehutanan	0.73	1.00	-27.18
1.5. Perikanan Laut dan Darat	6.49	3.45	17.51
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	4.12	2.24	2.27
3. INDUSTRI	3.21	0.16	3.40
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	18.02	-5.03	23.54
5. BANGUNAN	4.07	2.20	3.23
6. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	1.62	1.00	1.16
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	5.05	2.30	1.47
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, JASA PERUSAHAAN	1.12	1.18	2.08
9. JASA-JASA	2.85	2.08	11.09
Produk Domestik Regional Bruto	2.75	2.81	3.40

Sumber : *BPS Kabupaten Demak " Demak Dalam Angka 2004 "*

fis

5.2.2 Analisis Kuantitatif

alc

6.

Analisis Kuantitatif adalah analisis yang menggunakan data berupa angka – angka perhitungan. Analisis ini dapat diperoleh dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal (*fiscal need*), dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*)

5.3. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini menggunakan variabel – variabel sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan satuan milyar rupiah. (UU RI No.33 Tahun 2004).

2. Dana Bagi Hasil

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dengan satuan milyar rupiah. (UU RI No.33 Tahun 2004).

3. Penerimaan Daerah

Uang yang masuk ke kas daerah dengan satuan milyar rupiah.
(UU RI No.33 Tahun 2004).

fiskal dengan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan maka semakin besar pula alokasi Dana yang diterima dari pusat (Edy Suandy Hamid, 2005).

6.4. Upaya / Posisi Fiskal

Upaya fiskal (*tax effect*) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$UPPAD_j = \frac{PAD_j}{PDRB_j \text{ (tanpa migas)}}$$

$$UPPAD_j = \frac{17.671.121.260}{80.526.574.000}$$

$$UPPAD_j = 0,2194 \approx 0,219$$

Selanjutnya dihitung tingkat PAD standar (TPADs)

$$TPAD_s = \frac{\sum 1.491.411.048.000 / 45.605.369.000.000}{\sum 35}$$

$$TPAD_s = 0,0009 \approx 0,001$$

Untuk Indeks Kinerja PAD digunakan rumus:

$$IKPAD = \frac{UPPAD}{TPAD_s} \times 100\%$$

$$IKPAD_j = \frac{0,219}{0,001} \times 100\%$$

$$IKPAD_j = 2,19 \%$$

Perhitungan di atas menunjukkan besarnya IKPADj sebesar 2,19%, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pajak daerah maka *tax effect* juga semakin tinggi.

4. Mengkaji pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang mengindikasikan sikap over aktif pemerintah daerah terhadap pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya. Disisi lain, peningkatan alokasi transfer juga diikuti dengan pertumbuhan pengeluaran yang tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima pusat. Ada indikasi peningkatan pengeluaran yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi pengeluaran pemerintah daerah terutama pengeluaran rutin. Kencenderungan ini dalam jangka panjang akan berakibat pada peningkatan ketidakmerataan fiskal secara horizontal.

Michael P todaro, (2002), *Ekonomi Pembangunan di Dunia ke Tiga*, Jilid I terjemahan Hans Munandar, Erlangga, Jakarta.

Profil Kabupaten Demak tahun 2003, *Demak Dalam Angka 2004*, BPS dan BAPPEDA Kabupaten Demak.

Rizal Sudjarwan, (2005), *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2002*, Skripsi, Yogyakarta.

Sadono Sukirno, (1999), *Ekonomi Pembangunan*, lembaga Penerbit FE UI, Bina Grafik.

Situmorang , V.M (1993), *Hukum Administrasi Pemerintah di Daerah*, Bina Grafik, Jakarta.

Supriatmo, T (1999), *Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang – Undang Otonomi Daerah Tahun 2004, Citra Umbara, Bandung.